



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

RSUD PATUT PATUH PATJU

**INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT INSPEKTORAT

Jalan Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung No. Telp (0370) 681030

Fax. (0370) 681030. Kode Pos 83383

Email : inspektorat@lombokbaratkab.go.id

Web-mail : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Gerung, 22 Maret 2021

Nomor : 800/190/Inspektorat/II/2021
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Lapoan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

Kepada : Yth. Direktur RSUD "Patut Patuh Patju"
Kabupaten Lombok Barat
di -

Gerung

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020. (Laporan terlampir)

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Plt. Inspektur,

H. ILHAM, S.Pd, M.Pd
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT INSPEKTORAT

Jalan Soekarno-Hatta Giri Manang Gerung No. Telp (0370) 881030

Fax (0370) 881030, Kode Pos 83363

Email : inspektorat@lombokbaratkab.go.id

Web-mail : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(SAKIP) RSUD "PATUT PATUH PATJU" KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan meningkatkan hasil evaluasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan kinerja, termasuk di dalamnya perencanaan strategis, dan perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penilaian terhadap pengukuran kinerja, termasuk di dalamnya pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran;
- c. Penilaian terhadap pelaporan kinerja, termasuk di dalamnya pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja;
- d. Penilaian terhadap evaluasi internal, termasuk di dalamnya pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi; serta
- e. Penilaian terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi, meliputi indikator kinerja out-put dan indikator kinerja out-come.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced unsurve*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Teknik Evaluasi

- a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:
 - 1) Kuisisioner;
 - 2) Wawancara;
 - 3) Observasi;
 - 4) Studi dokumentasi;
 - 5) Kombinasi beberapa teknik tersebut di atas

b. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP :

- 1) Telaahan sederhana;
- 2) Analisis dan pengukuran data;
- 3) Metode statistik;
- 4) Perbandingan (*benchmarking*);
- 5) Analisis logika program

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

B. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi Implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dengan rincian kriteria evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- a. Perencanaan Kinerja (30,00 %);
- b. Pengukuran Kinerja (25,00 %);
- c. Pelaporan Kinerja (15,00 %);
- d. Evaluasi Internal (10,00 %); dan
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20,00 %)

2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi

- a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
- b. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- c. Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;

- d. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat, diperoleh hasil evaluasi seperti pada tabel berikut ini :

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	Perencanaan Kinerja	30.00	29.10	97.00%	Sangat Memuaskan	-0.90
I	Perencanaan Strategis	10.00	10.00	100.00%	Sangat Memuaskan	0.00
a	Pemenuhan Renstra	2.00	2.00	100.00%	Sangat Memuaskan	0.00
b	Kualitas Renstra	5.00	5.00	100.00%	Sangat Memuaskan	0.00
c	Implementasi Renstra	3.00	3.00	100.00%	Sangat Memuaskan	0.00
II	Perencanaan Kinerja Tahunan	20.00	19.10	95.50%	Memuaskan	-0.90
a	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	4.00	4.00	100.00%	Sangat Memuaskan	0.00
b	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	10.00	10.00	100.00%	Sangat Memuaskan	0.00
c	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	6.00	5.10	85.00%	Memuaskan	-0.90
B	Pengukuran Kinerja	25.00	20.63	82.50%	Memuaskan	-4.37
I	Pemenuhan Pengukuran	5.00	5.00	100.00%	Sangat Memuaskan	0.00
II	Kualitas Pengukuran	12.50	10.94	87.50%	Memuaskan	-1.56
III	Implementasi Pengukuran	7.50	4.69	62.50%	Baik	-2.81
C	Pelaporan Kinerja	15.00	13.56	90.43%	Sangat Memuaskan	-1.44
I	Pemenuhan Pelaporan	3.00	3.00	100.00%	Sangat Memuaskan	0.00
II	Penyajian Informasi Kinerja	7.50	6.96	92.86%	Sangat Memuaskan	-0.54
III	Pemanfaatan Informasi Kinerja	4.50	3.60	80.00%	Memuaskan	-0.90
D	Evaluasi Internal	10.00	8.85	88.50%	Memuaskan	-1.15
I	Pemenuhan Evaluasi	2.00	1.88	93.75%	Sangat Memuaskan	-0.12
II	Kualitas Evaluasi	5.00	4.73	94.50%	Sangat Memuaskan	-0.27
III	Pemanfaatan Evaluasi	3.00	2.25	75.00%	Sangat Baik	-0.75

Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Mandiri, Sejahtera dan Berprestasi
Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20.00	13.75	68.75%	Baik	-6.25
	Kinerja Yang Dilaporkan (Output)	7.50	5.00	66.67%	Baik	-2.50
	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)	12.50	8.75	70.00%	Baik	-3.75
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100.00	85.89	85.89%	Memuaskan	-14.11

Secara Umum Hasil Reviu Evaluasi Implementasi SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Tahun 2020 terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai sebesar **85,89** termasuk dalam kategori **A**, dengan tingkat akuntabilitas **Memuaskan**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat,

2. Saran/rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- Memperhatikan syarat indikator kinerja (memenuhi kriteria SMART) baik dalam penyusunan indikator dan menetapkan target yang relevan dan memenuhi kriteria target yang baik.
- Agar melakukan monitoring dan reviu secara berkala terhadap pencapaian target dalam Renstra dan pencapaian Rencana Aksi.

- c. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran dan monitoring kinerja berdasarkan IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan ditindaklanjuti dengan *incentive/merit system* (sistem penilaian kinerja pegawai).
- d. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai, sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- e. Menyusun *Cascading* Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dari level struktural (Eselon II, III, IV) sampai dengan individu pegawai (staf).
- f. Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat harus lebih di tingkatkan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Patut Patuh Patju" Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/rekomendasi agar segera ditindaklanjuti mengacu pada ketentuan yang berlaku.

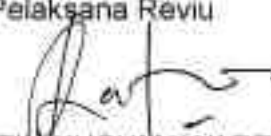
Gerung, 22 Maret 2021

Mengetahui
Ketua


JOHSAN, SE

NIP. 196409051986031021

Pelaksana Reviu


ERIKA RATIH KUSUMAWARDHANI

NIP. 198303172010012007

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "PATUT PATUH PATJU"**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	97.00%	29.10	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10.00	100.00%	10.00	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2.00	100.00%	2.00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1.00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5.00	100.00%	5.00	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1.00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1.00	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3.00	100.00%	3.00	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1.00	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1.00	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1.00	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	95.50%	19.10	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4.00	100.00%	4.00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10.00	100.00%	10.00	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1.00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1.00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/lugas fungsi)		A	1.00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1.00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6.00	85.00%	5.10	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1.00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0.75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0.75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1.00	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	82.50%	20.63	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00	100.00%	5.00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1.00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12.50	87.50%	10.94	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0.75	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		B	0.75	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1.00	OK
8	Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1.00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7.50	62.50%	4.69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0.75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dan selingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0.75	OK
19	IKU telah direviu secara berkala		B	0.75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	90.43%	13.56	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	100.00%	3.00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload ke dalam website		Y	1.00	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00	OK
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7.50	92.86%	6.96	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1.00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1.00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1.00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0.75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A	1.00	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1.00	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4.50	80.00%	3.60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0.75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0.75	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0.75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0.75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	88.50%	8.85	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	93.75%	1.88	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1.00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1.00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0.75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	94.50%	4.73	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1.00	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1.00	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1.00	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		A	1.00	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		A	1.00	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0.67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	75.00%	2.25	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0.75	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		B	0.75	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	60.75%	13.75	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7.5%)	7.50	66.67%	5.00	
1	Target dapat dicapai		B	2.00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12.5%)	12.50	70.00%	8.75	
4	Target dapat dicapai			3.33	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1.67	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3.75	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	85.89%	85.89	

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

85.89

KETUA

JOHSAN, SE

NIP. 198409051986031021

Pelaksana Reviu

ERIKA RATIH KUSUMAWARDHANI, SE

NIP. 198303172010012007

KERTAS KERJA EVALUASI
CAPAIAN SASARAN KINERJA
RSUD PATUT PATUH PATUJ KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME IP											
			SASARAN TERPIL		IK TERPIL		TARGET TERCAPAI		KINERJA LEBIH BAIK		DATA ANDAL			
	IP													
	OUTCOME													
1	Menyusun, mengorganisir, mengimplementasikan dan mengelola program SPK RS sesuai Standar KEMENKES No. 129 Tahun 2008	Indikator SPK RSUD dengan kategori terpuisi sebanyak 90 indikator	Y	1	Y	1	C	0.5		C	0.5		B	0.75
									50.00%			50.00%		75.00%
2	Mengelola nilai LAKIP RSUD Patut Patuh Patu dengan kategori B dengan nilai 90	Nilai LAKIP RSUD Patut Patuh Patu dengan kategori B dengan nilai 90	Y	1	Y	1	B	0.75		B	0.75		B	0.75
									75.00%			75.00%		75.00%
3	Meningkatkan Rumah Sakit Tipe B	Indikator Pelayanan Terpuisi (55) Indikator Sumber Daya Manusia terpuisi (40) Indikator peralatan terpuisi (17) Indikator sarana dan prasarana (4) Indikator administrasi dan manajemen terpuisi (12)	Y	1	Y	1	B	0.75		B	0.75		B	0.75
									75.00%			75.00%		75.00%
		Nilai pada kriteria							0.67			0.67		0.75

KERTAS KERJA EVALUASI
TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI
RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	TUJUAN	RENSTRA IP		SASARAN	RENSTRA IP		PK IP	
		ORIENTASI HASIL			ORIENTSI HASIL		ORIENTASI HASIL	
	RENSTRA IP			RENSTRA IP				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Y	1	Merencanakan , mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi penerapan SPM RS sesuai standar KEPMENKES No 129 tahun 2008.	Y	1		
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Y	1	Meningkatnya Nilai LAKIP RSUD Patut Patuh Patju	Y	1		
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Y	1	Menuju Rumah Sakit Tipe B	Y	1		
				PK IP				
1				Merencanakan , mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi penerapan SPM RS sesuai standar KEPMENKES No 129 tahun 2008.			Y	1
2				Meningkatnya Nilai LAKIP RSUD Patut Patuh Patju			Y	1
3				Menuju Rumah Sakit Tipe B			Y	1
			100.00%			100.00%		100.00%

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

[illegible]

**KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA IP
RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU									
			MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN		CUKUP		DIUKUR	
	IKU IP											
1	Merencanakan, mengorganisir, mengimplementasikan, dan mengawasi pencapaian SPM RS sesuai standar KEPMENKES No 129 tahun 2008	Indikator SPM RSUD dengan kategori terpenuhi sebanyak 93 indikator	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
	Memingkatkan Nilai LAKIP RSUD Patut Patuh Patju	Nilai LAKIP RSUD Patut Patuh Patju dengan kategori B dengan nilai 80	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	T	0
	Menuju Rumah Sakit Tipe II	indikator pelayanan terpenuhi (55)	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		indikator Sumber Daya Manusia terpenuhi (49)	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		indikator peralatan terpenuhi (13)	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		indikator sarana dan prasarana (43)	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		indikator administrasi dan manajemen terpenuhi (12)	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
				100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		85.71%



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

**INSPEKTOR
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Soekarno – Hatta Giri Menang, Gerung Telp. (0370) 6816366

Fax : (0370) 6816366, kode pos 83363

E-mail : inspektoratkablobar@gmail.com

Website : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Nomor : 800/178/Inspektorat/II/2021
Lampiran : 1 (Satu) exp.
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020

Gerung, 21 Maret 2021

Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Barat
di –

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat (Laporan terlampir)

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pt. INSPEKTUR,

H. ILHAM, S.Pd, M.Pd
NIP. 196512311988031240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Peringatan

*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dengan Nilai Pancasila Patuh Patra*



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT INSPEKTORAT

Jln. Soekarno – Hatta Giri Menang, Gerung Telp. (0370) 6816366

Fax : (0370) 6816366, kode pos 83363

E-mail : inspektorkablobar@gmail.com

Website : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- f. PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Didukung Nilai Patuh Patuh Patuh*

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan meningkatkan hasil evaluasi SAKIP
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik *"criteria referenced survey"*, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Teknik Evaluasi

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) kuisisioner;
- 2) wawancara;
- 3) observasi;
- 4) studi dokumentasi;
- 5) kombinasi beberapa teknik tersebut di atas

b. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP :

- 1) Telaahan sederhana;
- 2) Analisis dan pengukuran data;
- 3) Metode statistik;
- 4) Perbandingan (*benchmarking*);
- 5) Analisis logika program

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

- a. Telah diberikan reward dan punishment kepada pegawai setingkat eselon IV keatas berdasarkan capaian kinerjanya, meskipun belum maksimal;
- b. Penyajian LAKIP telah menginformasikan hambatan dari program/kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan;
- c. Penyajian LAKIP telah menginformasikan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan meskipun masih perlu ditingkatkan.

B. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dengan rincian criteria evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- Perencanaan kinerja (30.00 %)
- Pengukuran kinerja (25.00 %)
- Pelaporan kinerja (15.00 %)
- Evaluasi internal (10.00 %)
- Capaian kinerja (20.00 %)

2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi

- Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan.
- Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah.
- Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
- Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat diperoleh hasil evaluasi seperti pada tabel berikut ini :

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSEN-TASE	KATEGORI	KET (Deviasi)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A.	PERENCANAAN KINERJA	30,00	28,03	93,42 %	Sangat Memuaskan	-1,97
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	8,63	86,25 %	Memuaskan	-1,37
a.	PEMENUHAN RENSTRA	2,00	2,00	100,00 %	Sangat Memuaskan	0,00

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSEN-TASE	KATEGORI	KET (Deviasi)
b.	KUALITAS RENSTRA	5,00	4,38	87,50 %	Memuaskan	-0,62
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA	3,00	2,25	75,00 %	Sangat Baik	-1,20
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	19,40	97,00 %	Sangat Memuaskan	-0,60
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4,00	4,00	100,00 %	Sangat Memuaskan	1,20
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10,00	10,00	100,00 %	Sangat Memuaskan	0,00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6,00	5,40	90,00 %	Memuaskan	-0,60
B	PENGUKURAN KINERJA	25,00	22,19	88,75 %	Memuaskan	-2,81
I	PEMENUHAN PENGUKURAN	5,00	5,00	100,00 %	Sangat Memuaskan	0,00
II	KUALITAS PENGUKURAN	12,50	12,50	100,00 %	Sangat Memuaskan	0,00
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7,50	4,69	62,50 %	Baik	-2,81
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,49	83,25 %	Memuaskan	-2,61
I	PEMENUHAN PELAPORAN	3,00	2,81	93,75 %	Sangat Memuaskan	-0,19
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7,50	6,06	81,00 %	Memuaskan	-1,43
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4,50	3,60	80,00 %	Sangat Baik	-0,90
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	8,06	80,58 %	Memuaskan	-1,94
I	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	1,88	93,75 %	Sangat Memuaskan	-0,12
II	KUALITAS EVALUASI	5,00	4,31	86,17 %	Memuaskan	-0,69
III	PEMANFAATAN EVALUASI	3,00	1,88	62,50 %	Baik	-1,12
E	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI	20,00	15,13	75,63 %	Sangat Baik	-4,87
I	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTPUT)	7,50	5,00	66,67 %	Baik	-2,50
II	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTCOME)	12,50	10,13	81,00 %	Memuaskan	-2,37
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100,00	88,88	88,88 %	Memuaskan	-14,12

Secara Umum Hasil Reviu Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Didukung Niat Panah Putih Pangu*

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai sebesar **85,88 (A)** dengan kategori **Memuaskan**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa yang akan datang, antara lain:

- a. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai setingkat eselon IV keatas berdasarkan capaian kinerjanya belum maksimal;
- b. Tindaklanjut terhadap hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata masih belum maksimal;
- c. Terdapat target kinerja dengan capaian 0 (nol) persen, yang disebabkan oleh kondisi pandemi *covid-19* yang tidak berakhir hingga akhir Tahun 2020.
- d. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat masih belum maksimal.

2. Saran/rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan pemberian reward dan punishment kepada pegawai setingkat eselon IV ke atas, bahkan mulai dari pelaksana, berdasarkan capaian kinerjanya;
- b. Memaksimalkan pelaksanaan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata;
- c. Dalam hal terjadi situasi dan kondisi di luar kendali manajemen yang tidak memungkinkan untuk tercapainya sebuah target kinerja yang telah ditetapkan, hendaknya dilakukan peninjauan kembali terhadap target yang telah ditetapkan tersebut dan dilakukan perubahan (penyesuaian) dengan memperhatikan situasi dan kondisi riil yang terjadi.
- d. Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat masih perlu ditingkatkan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/rekomendasi agar segera difindak lanjuti mengacu peraturan yang berlaku.

Gerung, **11** Maret 2021

Mengetahui
Koordinator.



J. H. S. A. N. SE.

NIP. 19640905 198603 1 021

Pelaksana Reviu.



Drs. I DEWA NYOMAN ALIT

NIP. 19641226 200604 1 002

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	92,42%	28,03	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	66,25%	6,63	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	100,00%	2,00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	87,50%	4,38	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	75,00%	2,25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	97,00%	19,40	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	100,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK

12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	90,00%	5,40	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	81,75%	22,19	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	100,00%	12,50	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,00	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0,75	OK
19	IKU telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	83,33%	12,49	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	93,75%	2,81	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK

4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	81,00%	6,08	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,67	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	80,58%	8,06	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	93,75%	1,88	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan-hambatan		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	86,17%	4,31	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1,00	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	62,50%	1,88	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12		10	C	0,50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	75,83%	15,13	
KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	68,97%	5,00	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	

2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	81,80%	10,13	
4	Target dapat dicapai			3,50	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,80	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4,75	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	85,88%	85,88	

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'Y/T'

KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'A'

UNTUK PERTANYAAN E.4-16 JAWABAN DITULIS PADA KKE1-I, KKE1-II, DAN KKE1-III

Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 90-100	AA	Sangat Memuaskan
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 80-90	A	Memuaskan
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 70-80	BB	Sangat Baik
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 60-70	B	Baik
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 50-60	CC	Cukup
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 40-50	C	Kurang
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria < 30	D	Sangat Kurang

Koordinator

J O H S A N A, S.E.
 NIP. 19640905 198603 1 021

Gerung, 15 Maret 2021
 Pelaksana Reviu

Drs. I DEWA NYOMAN ALIT
 NIP. 19641226 200604 1 002

KERTAS KERJA EVALUASI
CAPAIAN SASARAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME IP											
			SASARAN TEPAT		IK TEPAT		TARGET TENCAPAI		KINERJA LEBIH BAIK		DATA ANDAL			
	IP													
	OUTCOME													
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Y	1	Y	1	B	0,75		B	0,75		A	1
								75,00%				75,00%		100,00%
2	Meningkatkan Nilai AKIP	Nilai AKIP	Y	1	Y	1	A	1		A	1		A	1
								100,00%				100,00%		100,00%
3	Terbinaanya Wirausaha Muda	Persentase Wirausaha Muda yang Aktif	Y	1	Y	1	A	1		A	1		A	1
								100,00%				100,00%		100,00%
4	Terbinaanya Organisasi Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Y	1	Y	1	B	0,75		B	0,75		A	1
								75,00%				75,00%		100,00%
5	Terbinaanya Cabor Potensial dan Unggulan	Persentase Prestasi Cabor Unggulan	Y	1	Y	1	B	0		C	0,25		B	0,75
								0,00%				25,00%		75,00%
		Persentase pemenuhan kriteria												
		Nilai pada Kriteria						0,7				0,75		0,95

**KERTAS KERJA EVALUASI
TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI**

NO	TUJUAN	RENSTRA IP		SASARAN	RENSTRA IP		PK IP	
			ORIENTSI HASIL			ORIENTSI HASIL		ORIENTASI HASIL
	RENSTRA IP			RENSTRA IP				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Y	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Y	1		
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Y	1	Meningkatkan Nilai AKIP	Y	1		
3	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Y	1	Terbinanya Organisasi Pemuda	Y	1		
				Terbinanya Wirausaha Muda	Y	1		
				Terbinanya Cabor Potensial dan Unggulan	Y	1		
				PK IP				
1				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Y	1
2				Meningkatkan Nilai AKIP			Y	1
3				Terbinanya Organisasi Pemuda			Y	1
4				Terbinanya Wirausaha Muda			Y	1
5				Terbinanya Cabor Potensial dan Unggulan			Y	1
			100,00%			100,00%		100,00%

KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA TUJUAN IP

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RENSTRA	IP	KRITERIA INDIKATOR KINERJA TERUKUR DALAM DOKUMEN								PENGU-KURAN	
					MEASURABLE	ORIENTASI	RELEVAN	CUKUP						
	RENSTRA IP													
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IKM	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatkan Tata Kelola	Nilai AKIP	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
3	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase Wirausahawan Muda yang Aktif	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
		Persentase Cabor Potensial dan Unggulan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
				62.50%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%

**KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA IP**

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU							
			MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN		CUKUP	
	IKU IP									
1	Terbinanya Wirausaha Muda	Persentase Wirausahawan Muda yg aktif	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
2	Terbinanya Organisasi Pemuda	Persentase organisasi pemuda yg aktif	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
3	Terbinanya Cabor Potensial dan Unggulan	Persentase Prestasi Cabor Unggulan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
4			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
5			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
6			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
7			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi		

[illegible]



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

**DINAS PERHUBUNGAN
KAB. LOMBOK BARAT**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT

Jalan. Sockamio – Hatta, Giri Menang-Gerung No. Telp. (0370) 6186366,
Fax : (0370) 6186366, KodePos. 83363
Email : inspektoratkablobar@gmail.com
Website : inspektorat.lombokbaritkab.go.id

Nomor : 000/164/Inspektorat/131/2021
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020**

Gerung, 22 Maret 2021

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Barat
di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat (Laporan terlampir)

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk segera dilakukan langkah – langkah perbaikan

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih


Pit. Inspektur,
H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Perlinggal

*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Ditandai Dilandasi Nilai Patuh Patuh Patuh*



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT

Jalan. Soekarno – Hatta, Giri Menang-Gering No. Telp. (0370) 6186366,

Fax : (0370) 6186366, KodePos 83363

Email : inspektoratkablobar@gmail.com

Website : inspektorat.lombokbaratkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung – Jawab Keuangan Negara Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- f. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan meningkatkan hasil evaluasi SAKIP
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi / unit kerja yang bersangkutan.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced surueu*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan

dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Teknik Evaluasi

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) kuisisioner;
- 2) wawancara;
- 3) observasi;
- 4) studi dokumentasi;
- 5) kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

b. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) Telaahan sederhana;
- 2) Analisis dan pengukuran data;
- 3) Metode statistik;
- 4) Perbandingan (*benchmarking*);
- 5) Analisis logika program.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

B. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi Implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dengan rincian kriteria evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- a. Perencanaan kinerja (30,00 %)
- b. Pengukuran kinerja (25,00 %)
- c. Pelaporan kinerja (15,00 %)
- d. evaluasi internal, (10,00 %)
- e. capaian kinerja, (20,00 %)

2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi

- Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
- Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
- Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat diperoleh hasil evaluasi seperti pada tabel berikut ini :

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	28,78	95,94%	Sangat Memuaskan	-1,22
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	8,78	87,81%	Memuaskan	-1,22
a	PEMENUHAN RENSTRA	2,00	2,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
b	KUALITAS RENSTRA	5,00	4,53	90,63%	Sangat Memuaskan	-0,47
c	IMPLEMENTASI RENSTRA	3,00	2,25	75,00%	Sangat Baik	-0,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	20,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
a	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4,00	4,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10,00	10,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6,00	6,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00

*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dengan Dilandasi Nilai Paniah Patuh Patu*

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
B	PENGUKURAN KINERJA	25,00	20,63	82,50%	Memuaskan	-4,37
I	PEMENUHAN PENGUKURAN	5,00	5,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
II	KUALITAS PENGUKURAN	12,50	10,94	87,50%	Memuaskan	-1,56
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7,50	4,69	62,50%	Baik	-2,81
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,31	82,07%	Memuaskan	-2,69
I	PEMENUHAN PELAPORAN	3,00	3,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7,50	5,71	76,14%	Sangat Baik	-1,79
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4,50	3,60	80,00%	Sangat Baik	-0,90
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	7,27	72,68%	Baik	-2,73
I	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	1,71	85,50%	Memuaskan	-0,29
II	KUALITAS EVALUASI	5,00	3,68	73,67%	Sangat Baik	-1,32
III	PEMANFAATAN EVALUASI	3,00	1,88	62,50%	Baik	-1,12
E	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20,00	16,88	84,38%	Memuaskan	-3,12
	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTPUT)	7,50	7,50	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTCOME)	12,50	9,38	75,00%	Sangat Baik	-3,12
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100,00	85,86	85,86%	Memuaskan	-14,14

Secara Umum Hasil Reviu Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai sebesar **85,86 %** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat,

2. Saran/rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internet dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi perlu ditingkatkan
- 2) Hasil Evaluasi program/akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, perbaikan kinerja dan mengukur keberhasilan masing-masing bidang/bagian.
- 3) Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai, sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- 4) Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat harus lebih di tingkatkan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/rekomendasi agar segera ditindaklanjuti mengacu ketentuan yang berlaku.

Gerung, 22-Maret 2021

Mengetahui ;
Ketua Tim,


JOHSAN, SE

NIP. 19640905 198603 1 021

Pelaksana Reviu,


DESAK KM. SINUNG SUMERTHI, S.Adm

NIP. 19730818 199203 2 001

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	85,84%	25,75	
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	87,81%	8,78	
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	100,00%	2,00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	90,63%	4,53	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	100,00%	20,00	
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	

2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	100,00%	6,00	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A	1,00	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		A	1,00	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	82,50%	20,63	
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK

II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	87,50%	10,94	
5	IKU telah memenuhi kriteria Indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (Indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi Informasi		Y	1,00	OK
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0,75	OK
19	IKU telah <i>direvisi secara berkala</i>		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C.	PELAPORAN KINERJA (15%)	15,00	82,07%	12,31	
I.	PEMEMUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	OK
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	76,14%	5,71	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK

8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadal antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	72,68%	7,27	
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	85,50%	1,71	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00	
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,67	OK
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00	73,67%	3,68	
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1,00	OK
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0,50	OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK

III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00	62,50%	1,88	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI		20,00	84,38%	16,88	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7,50	100,00%	7,50	
1	Target dapat dicapai		A	3,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A	1,50	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A	3,00	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12,50	75,00%	9,38	
4	Target dapat dicapai			3,75	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,88	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,75	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00	85,86%	85,86	

Mengetahui :
KETUA TIM,

JOHSAN, SE

NIP. 19640905 198603 1 021

Gerung, 02 Maret 2021

Pelaksana Reviu,


DESAK KM. SINUNG SUMERTIH, S. Adm
NIP : 19730818 199203 2 001

**KERTAS KERJA EVALUASI
TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI**

NO	TUJUAN	RENSTRA IP		SASARAN	RENSTRA IP		PK IP	
			ORIENTASI HASIL			ORIENTASI HASIL		ORIENTASI HASIL
	RENSTRA IP			RENSTRA IP				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Y	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Y	1		
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Y	1	Nilai AKIP	Y	1		
3	Meningkatkan kemudahan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat	Y	1	Capaian Wilayah Terhubung dengan Moda Transportasi	Y	1		
				Persentase Jalur Trayek Aklif Menuju Pusat Perakoonnian (Pasar)	Y	1		
				PK IP				
1				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Y	1
2				Meningkatnya Nilai AKIP			Y	1
3				Terpenuhinya Kacukupan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak dan Memadai			Y	1
4				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah			Y	1
			100,00%			100,00%		100,00%

**KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA SASARAN IP**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KRITERIA INDIKATOR KINERJA TERUKUR DLM DOKUMEN PERENCANAAN										PENGUKURAN			
			RENSTRA IP		PK IP		MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN		CIKUP		IP	
	RENSTRA IP															
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	KM	Y	1			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Y	1			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
3	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Capaian Wilayah Terhubung dengan Moda Transportasi	Y	1			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
4		Persentase Jalur Trayek Aktif Menuju Pusat Perkotaan (Pasar)	Y	1			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
	PK IP															
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai AKIP Dinas			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatnya Nilai AKIP	Capaian Nilai AKIP Dinas			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
3	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak dan Menadai	Persentase Pelayan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat dan laut			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
4	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Moda Transportasi			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
		Persentase Jalur Trayek Aktif Menuju Pusat Perkotaan (Pasar)			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1

**KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA IP**

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU									
			MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN		CUKUP		DIUKUR	
	IKU IP											
1	Terperuhnya kecukupan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Wilayah Terhubung dengan Moda Transportasi	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase Jalur Trayek Aktif Menuju Pusat Perkonomian (Pasar	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
				100%		100%		100%		100%		100%

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

**LAPORAN HASIL
EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT

Jalan, Soekarno – Hatta, Giri Menung-Gerung No. Telp. (0370) 6186366,
Fax : (0370) 6186366, KodePos 83363
Email : inspektorkablorbar@gmail.com
Website : inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Nomor : 800/163/Inspektorat/III/8021
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2020**

Gerung, 22 Maret 2021

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Barat
di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat (Laporan terlampir)

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk segera dilakukan langkah – langkah perbaikan

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih


Pn. Inspektur,
H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Peringgal

*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dengan Didukung Nilai Pantun Patuh Patu*



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

INSPEKTORAT

Jalan. Soekarno – Hatta, Giri Menang-Gerung No. Telp. (0370) 6186366,
Fax : (0370) 6186366, KodePos 83363
Email : inspektorkablobar@gmail.com
Website : inspektorat.lombokbaratkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung – Jawab Keuangan Negara Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- f. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

2. Latar Belakang

Pengualan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dengan Dilandasi Nilai Pantut Patuh Patu*

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan meningkatkan hasil evaluasi SAKIP
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. Evaluasi terhadap kebijakan Instansi / unit kerja yang bersangkutan.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Teknik Evaluasi

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) kuisisioner;
- 2) wawancara;
- 3) observasi;
- 4) studi dokumentasi;
- 5) kombinasi beberapa teknik tersebut di atas

b. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP :

- 1) Telaahan sederhana;
- 2) Analisis dan pengukuran data;
- 3) Metode statistik;
- 4) Perbandingan (*benchmarking*);
- 5) Analisis logika program

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

B. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi Implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat dengan rincian kriteria evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- a. Perencanaan kinerja (30,00 %)
- b. Pengukuran kinerja (25,00 %)
- c. Pelaporan kinerja (15,00 %)
- d. evaluasi internal: (10,00 %)
- e. capaian kinerja. (20,00 %)

2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi

- a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
- b. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- c. Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
- d. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat diperoleh hasil evaluasi seperti pada tabel berikut ini :

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,27	87,56	Memuaskan	-3,73
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	8,47	84,69	Memuaskan	-1,53
a	PEMENUHAN RENSTRA	2,00	2,00	100	Sangat Memuaskan	0,00
b	KUALITAS RENSTRA	5,00	4,22	84,38	Memuaskan	-0,78
c	IMPLEMENTASI RENSTRA	3,00	2,25	75,00	Sangat Baik	-0,75

II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	17,80	89	Memuaskan	-2,20
a	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4,00	4,00	100	Sangat Memuaskan	0,00
b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10,00	9,00	90,00	Memuaskan	-1,00
c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6,00	4,80	80,00	Sangat Baik	-1,20
B	PENGUKURAN KINERJA	25,00	19,69	78,75	Sangat Baik	-5,31
I	PEMENUHAN PENGUKURAN	5,00	5,00	100,00	Sangat Memuaskan	0,00
II	KUALITAS PENGUKURAN	12,50	10,00	80,00	Sangat Baik	-2,50
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7,50	4,69	62,50	Baik	-2,81
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,76	85,07	Memuaskan	-2,24
I	PEMENUHAN PELAPORAN	3,00	3,00	100	Sangat Memuaskan	0,00
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7,50	6,16	82,14	Memuaskan	-1,34
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4,50	3,60	80,00	Sangat Baik	-0,90
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	8,23	82,25	Sangat Baik	-1,78
I	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	1,88	93,75	Memuaskan	-0,13
II	KUALITAS EVALUASI	5,00	4,10	82,00	Baik	-0,90
III	PEMANFAATAN EVALUASI	3,00	2,25	75,00	Sangat Baik	-0,75
E	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20,00	18,88	94,38	Sangat Memuaskan	-1,13
	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTPUT)	7,50	6,50	86,67	Memuaskan	-1,00
	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTCOME)	12,50	12,38	99,00	Sangat Memuaskan	-0,13
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100	85,82	85,82	Memuaskan	-14,18

Secara Umum Hasil Reviu Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai sebesar **85,82 %** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat.

2. Saran/rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internet dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi perlu ditingkatkan
- 2) Hasil Evaluasi program/akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, perbaikan kinerja dan mengukur keberhasilan masing-masing bidang/bagian.
- 3) Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai, sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- 4) Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat harus lebih di tingkatkan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatataan Ruang Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/rekomendasi agar segera ditindaklanjuti mengacu ketentuan yang berlaku.

Gerung, 22 Maret 2021

Mengetahui :
Ketua Tim,


JOHSAN, SE.

NIP. 19640905 198603 1 021

Pelaksana Reviu,


DESAK KM. SINUNG SUMERTHI, S. Adm

NIP. 19730818 199203 2 001

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	%	SKPD		KONTROL KERANGKA
			Y	Nilai	
1	2	3	4	5	
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)					
		30,00	87,56%	26,27	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)					
		10,00	84,69%	8,47	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)					
		2,00	100,00%	2,00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat Tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)					
		5,00	84,38%	4,22	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil		B	0,75	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)					
		3,00	75,00%	2,25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)					
		20,00	99,00%	17,80	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)					
		4,00	100,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)					
		10,00	99,00%	9,00	
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0,75	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK

13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
II. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (5%)		5,00	80,00%	4,00	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyesuaian (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	78,78%	19,69	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Terdapat ukuran kinerja tingkat eselon II dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	80,00%	10,00	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0,75	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		B	0,75	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari selingkat eselon IV ke atas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment)		B	0,75	OK
19	IKU telah difrekwir secara berkala		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	85,07%	12,76	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK

4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian (KJ)		A	1,00	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	82,14%	6,18	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjelaskan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,75	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	88,90%	3,80	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	82,25%	8,23	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	93,75%	1,88	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	82,00%	4,10	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1,00	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah recommending perbaikan setiap periode		B	0,50	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	75,00%	2,25	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		B	0,75	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	84,30%	16,86	
KINERJA YANG DI LAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	88,67%	6,65	
1	Target dapat tercapai		A	3,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A	1,50	

3. Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		8	2,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12,50	99,00%	12,38	
4. Target dapat dicapai			5,00	
5. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2,38	
6. Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100,00	99,82%	85,82	

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS
KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'Y/T'
KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'A'
UNTUK PERTANYAAN E.4-18 JAWABAN DITULIS PADA KKE1-I, KKE1-II, DAN KKE1-III

Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 90-100	AA	Sangat Memuaskan
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 80-90	A	Memuaskan
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 70-80	BB	Sangat Baik
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 60-70	B	Baik
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 50-60	CC	Cukup
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria > 30-50	C	Kurang
Nilai Pemenuhan terhadap kriteria 0-30	D	Sangat Kurang

Mengetahui,
KETUA TIM,
JOHANIS RE
Np. 19640205 198603 1 021

Gerung, 22 Maret 2021

PELAKSANA REVISI
DESAK KUSUMAH, S.Adm
Np : 19730818 199203 2 001

**KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA IP**

NO	TUJUAN SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU				
			MEASURABLE	ORIENTASI HASIL	RELEVAN	CUKUP	DEKUR
	KU IP						
1	Meningkatkan Kondisi Pemukiman Jauh	Persentase Jalan Keluar-pada Dalam Kondisi Mantap	Y	Y	Y	Y	Y
2	Meningkatnya Pengendalian dan Peningkatan Perataan Ruang	Persentase Rumah Terpadat RT 007	Y	Y	Y	Y	Y
3	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar Sektar	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sektar Layak	Y	Y	Y	Y	Y
4	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	Y	Y	Y	Y	Y
5	Meningkatnya Penyediaan Air Inap dan Air Baku Untuk Produktifitas Labor Perikanan dan Perikanan Air Laut Sektor	Persentase Inapel Kelengkapan Dalam Kondisi Baik	Y	Y	Y	Y	Y
6	Meningkatnya Efektivitas Program Kegiatan dan Optimalisasi Pelayanan Jasa Konsumsi Pangan dan LK Mekar	MM	Y	Y	Y	Y	Y
		KU KIP	Y	Y	Y	Y	Y
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA SASARAN IP

NO	SASARAN	INDIKATOR KHERJA SASARAN	KRITERIA INDIKATOR KHERJA TERBUKUK D M OGRUMEN PERENCANAAN								PESOLUKURAN			
			RENSTRA IP		PK IP	MEASURABLE		ORIENTASI	RELEVAN	CUKUP	IP			
	RENSTRA IP													
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	NRA AKOP	Y	1		Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	Y	1		Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	
3	Meningkatnya Optimalisasi Pelayanan Jasa Konstruksi, Peralatan dan Upr Material	Persentase Optimalisasi Pelayanan Jasa Konstruksi, Peralatan dan Upr Material	Y	1		Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	
4	Menyediakan air ingasi dan air beku untuk produktifitas lahan pertanian dan pemukiman di multi sektor	Persentase Pancing Janggan Ingasi Kondisi Bak	Y	1		Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	
5	Peningkatan Kondisi Kemitraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Y	1		Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	
6	Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM janggan perpipaan dan bukan janggan perpipaan terlindung	Y	1		Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Y	1		Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	
7	Meningkatnya pengendalian dan pemertihan pertanahan ruang	Frekuensi rapat koordinasi teknis dan evaluasi target	Y	1		Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	
	PK IP													
1	Peningkatan kondisi kemitraan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan pertanahan ruang	Kawasan RT/RW			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
3	Menyediakan air ingasi dan air beku untuk produktifitas lahan pertanian dan pemukiman di multi sektor	Persentase ingasi Kabupaten dalam kondisi bak			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
4	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM janggan perpipaan dan bukan janggan perpipaan terlindung			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
5	Peningkatan optimalisasi pelayanan jasa konstruksi, peralatan dan upr material	Persentase pelayanan jasa konstruksi, pelayanan upr bahan dan upr material			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
6	Peningkatan implementasi program/kegiatan dan pelayanan publik	OKM			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		NRA AKOP			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
					100,00%			100,00%			100,00%			100,00%

KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA TUJUAN IP

[illegible]

NO	TUJUAN	RENSTRA IP		SARANAN	RENSTRA IP		PK IP	
			ORIENTASI HASIL			ORIENTASI HASIL		ORIENTASI HASIL
	RENSTRA IP			RENSTRA IP				
1	Meningkatkan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dalam pencapaian target nasional serta optimalisasi pelayanan jasa konstruksi, perizinan dan uji material	✓	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	✓	1		
		✓	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	✓	1		
		✓	1	Meningkatnya Optimalisasi Pelayanan Jasa Konstruksi, Perizinan dan Uji Material	✓	1		
2	Menyediakan air bersih dan air irigasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan air irigasi dalam upaya optimalisasi produktivitas lahan pertanian	✓	1	Meningkatkan air irigasi dan air baku untuk produktivitas lahan pertanian dan pemukiman air masyarakat	✓	1		
3	Menyediakan pelayanan jalan dan jembatan untuk transportasi arus transportasi dengan aman dan nyaman	✓	1	Peningkatan Kondisi Kemudahan Jalan	✓	1		
4	Menyediakan pelayanan air bersih dan sanitasi untuk pelayanan publik	✓	1	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi	✓	1		
5	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penduduk ruang sesuai dengan tata ruang	✓	1	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan perubahan ruang	✓	1		
				PK IP				
1		1		Peningkatan kondisi kemudahan jalan			✓	1
2		2		Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman penduduk ruang			✓	1
3		3		Menyediakan air irigasi dan air baku untuk produktivitas lahan pertanian dan pemukiman air masyarakat			✓	1
4		4		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi			✓	1
		5		Peningkatan optimalisasi pelayanan jasa konstruksi, perizinan dan uji material			✓	1
		6		Peningkatan sinergisasi program/kegiatan dan pelayanan publik			✓	1
AKHIR								
			100,00%			100,00%		100,00%



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

SEKRETARIAT DAERAH

**INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Soekarno – Hatta Giri Menang Gerung Telp.(0370)6186366

Fax : (0370) 6186366, Kode Pos 83363

Email: inspektoratkablobar@gmail.com

Website : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Nomor : 300/160/Inspektorat/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020.

Gerung, 12 Maret 2021

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Barat
di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Laporan terlampir)

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih


Pj. Inspektur,
H.ILHAM, S.Pd M.Pd
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Soekarno – Hatta Giri Menang Gerung, Telp (0370) 6186366
Fax : (0370) 6186366, Kode Pos 83363
E-mail: inspektoratkablobar@gmail.com
Website : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- f. PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan meningkatkan hasil evaluasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan

selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Teknik Evaluasi

e. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) Kuisisioner;
- 2) Wawancara;
- 3) Observasi;
- 4) Studi dokumentasi;
- 5) Kombinasi beberapa teknik tersebut di atas

f. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP :

- 1) Telaahan sederhana;
- 2) Analisis dan pengukuran data;
- 3) Metode statistik;
- 4) Perbandingan (*benchmarking*);
- 5) Analisis logika program

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

B. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi Implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan rincian criteria evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- a. Perencanaan Kinerja (30.00 %)
- b. Pengukuran Kinerja (25.00 %)
- c. Pelaporan Kinerja (15.00 %)
- d. Evaluasi Internal (10.00 %)
- e. Capaian Kinerja (20.00 %)

2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi

- Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
- Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
- Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat diperoleh hasil evaluasi seperti pada tabel berikut ini :

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,43	91,42%	Sangat Memuaskan	-2,57
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	8,63	86,25%	Memuaskan	-1,37
a	PEMENUHAN RENSTRA	2,00	2,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
b	KUALITAS RENSTRA	5,00	4,38	87,50%	Memuaskan	-0,62
c	IMPLEMENTASI RENSTRA	3,00	2,25	75,00%	Sangat Baik	-0,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	18,80	94,00 %	Sangat Memuaskan	-1,2
a	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4,00	4,00	100,00 %	Sangat Memuaskan	0,00
b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10,00	10,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6,00	4,80	80,00%	Sangat Baik	-1,2
B	PENGUKURAN KINERJA	25,00	20,31	81,25%	Memuaskan	-4,69
I	PEMENUHAN PENGUKURAN	5,00	5,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
II	KUALITAS PENGUKURAN	12,50	10,83	85,00%	Memuaskan	-1,67

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7,50	4,69	62,50%	Baik	-2,81
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,64	90,96%	Sangat Memuaskan	-1,36
I	PEMENUHAN PELAPORAN	3,00	2,81	93,75%	Sangat Memuaskan	-0,19
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7,50	7,23	96,43%	Sangat Memuaskan	-0,27
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4,50	3,60	80,00%	Sangat Baik	-0,9
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	7,56	75,58 %	Sangat Baik	-2,44
I	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	12,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
II	KUALITAS EVALUASI	5,00	3,68	73,67%	Sangat Baik	-1,32
III	PEMANFAATAN EVALUASI	3,00	1,88	90,16%	Sangat Memuaskan	-1,12
E	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20,00	16,83	62,50%	Baik	-3,17
I	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTPUT)	7,50	6,00	84,17%	Sangat Baik	-1,75
II	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTCOME)	12,50	10,83	80,00%	Memuaskan	-1,67
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00	85,77	85,77%	Memuaskan	-14,27

Secara Umum Hasil Reviu Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai sebesar **85,77**, dengan kategori **Memuaskan (A)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

2. Saran/rekomendasi

Terhadap evaluasi yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya agar meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/rekomendasi agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Gerung, 22 Maret 2021

Mengetahui
Kepala Tim,



JOHSAN, SE

NIP. 19640905 198603 1 021

Pelaksana Evaluasi,



KHAIRANI JUMIANA, S. ADM

NIP. 19650910 199003 2 013

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

NO	KOMPONEN SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	91.42%	27.43	
1.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	86.25%	8.63	
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	100.00%	2.00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1.00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	87.50%	4.38	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0.75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0.75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0.75	OK
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	75.00%	2.25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0.75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0.75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0.75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	94.00%	18.80	
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	100.00%	4.00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	100.00%	10.00	
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1.00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1.00	OK

11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1.00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1.00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6.00	80.00%	4.80	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1.00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0.75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0.75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	81.25%	20.31	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00	100.00%	5.00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1.00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12.5%)		12.50	85.00%	10.63	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1.00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0.75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7.5%)		7.50	62.50%	4.69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0.75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0.75	OK
19	IKU telah direvisi secara berkala		B	0.75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	90.56%	13.54	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	91.75%	2.81	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00	

2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0.75	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7.50	96.43%	7.23	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1.00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjangkan		A	1.00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1.00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1.00	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A	1.00	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1.00	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50	80.00%	3.60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0.75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0.75	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0.75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0.75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	75.56%	7.56	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	100.00%	2.00	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1.00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1.00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		A	1.00	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	73.67%	3.68	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0.75	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0.75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0.67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	62.50%	1.88	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0.75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0.50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	92.50%	18.50	
KINERJA YANG LAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50	80.00%	6.00	

1	Target dapat dicapai		A	3.00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00	
	KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12.50	100.00%	12.50	
4	Target dapat dicapai			5.00	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2.50	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5.00	
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100.00	87.44%	87.44	

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'Y/T'

KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'A'

UNTUK PERTANYAAN E.4-16 JAWABAN DITULIS PADA KKE1-I, KKE1-II, DAN KKE1-III

Nilai Perolehan tertinggi (maksimum)	AA	Sangat Memuaskan
Nilai Perolehan tertinggi (maksimum)	A	Memuaskan
Nilai Perolehan tertinggi (maksimum)	BB	Sangat Baik
Nilai Perolehan tertinggi (maksimum)	B	Baik
Nilai Perolehan tertinggi (maksimum)	CC	Cukup
Nilai Perolehan tertinggi (maksimum)	C	Kurang
Nilai Perolehan tertinggi (maksimum)	D	Kurang

Mengetahui
Ketua Tim Evaluasi

JOHAN SE
NIP. 196409051986031021

Gerung, Maret 2021

Pelaksana Evaluasi

KHAIRANI JUMANA, S.Adm
NIP. 196509101990032013

PHOTOGRAPH BY JAMES HARRIS
STYLING BY JESSICA HARRIS

[illegible]

KERTAS KERJA EVALUASI
TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI

NO	TUJUAN	RENSTRA IP		SASARAN	RENSTRA IP		PK IP	
			ORIENTASI HASIL			ORIENTASI HASIL		ORIENTASI HASIL
	RENSTRA IP			RENSTRA IP				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Y	1	Meningkatnya pembinaan dan pengorganisasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan dan organisasi Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pembantuan Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pertanggung jawaban umum, humas dan protokol	Y	1		
					Y	1		
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	Y		Meningkatnya pembinaan dan pengorganisasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan dan organisasi Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pembantuan	Y	1		
					Y	1		
				PK IP				
				Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pertanggung jawaban, umum, humas dan protokol			Y	1
				Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan dan organisasi			Y	1
				Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pembantuan			Y	1
			100.00%			100.00%		100.00%

KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA SASARAN IP

KRE 3A 15

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KRITERIA INDIKATOR KINERJA TERURUT DLM DIMENSI PENCAPAIAN								PENCAPAIAN	
			REKSTRASIP		PKIP		MEASURABLE	ORIENTASI	RELEVAN	CORUP	IP	
1	Meningkatnya pembinaan dan pengoptimalan dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum pemerintah dan organisasi	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Y	1			Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatkan pembinaan dan pengoptimalan penyelenggaraan pelayanan dan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan	Nilai IPPD	Y	1			Y	1	Y	1	Y	1
3	Meningkatkan pembinaan dan pengoptimalan penyelenggaraan pelayanan, terutama teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan reformasi, pertengahan, urusan rumah dan protokol	Nilai RKM	Y	1			Y	1	Y	1	Y	1
4	Meningkatnya pembinaan dan pengoptimalan dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan dan organisasi	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Y	1			Y	1	Y	1	Y	1
5	Meningkatnya pembinaan dan pengoptimalan penyelenggaraan pelayanan dan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan	Nilai RKM	Y	1			Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Administrasi Urusan dan Rumah					Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai RKM					Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur					Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai AVR					Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai RMRD					Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan pembangunan					Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai AVR					Y	1	Y	1	Y	1
PLIP												
1	Meningkatnya pembinaan dan pengoptimalan pelaksanaan program dan pelayanan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, reformasi, pertengahan, urusan rumah dan protokol	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Administrasi Urusan dan Rumah			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		RKM					Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai AVR					Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai RMRD										
2	Meningkatnya pembinaan dan pengoptimalan dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan dan organisasi	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai IPPD					Y	1	Y	1	Y	1
3	Meningkatnya pembinaan dan pengoptimalan penyelenggaraan pelayanan dan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
							100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA IP

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU									
			MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN		CUKUP		DIUKUR	
	IKU IP											
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai LPPD	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		IKM	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		IKM	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Administrasi Umum dan Tata Kelola	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		IKM	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai AKIP	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai RMRB	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Nilai AKIP	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
				100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%



LAPORAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

**DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT
Jl. SOEKARNO-HATTA GIRI MENANG GERUNG TELP. (0370) 6186366
Fax : (0370) 6186366, Kode Pos 83363
Email : inspektoratkablobar@gmail.com
Website : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Gerung, 22 Maret 2021

Nomor : 800/157/Inspektomat/III/2021
Lampiran :
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020.**

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Barat
di -
Tempat.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat (**terlampir**)

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pt. Inspektur,

H. I L H A M, S.Pd, MPd
NIP. 19651231 198603 1 015

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Perlinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang-Gerung, Telp. (0370) 681030

Fax: (0370) 681030, kode pos 83363

E-mail: inspektorat@lombokbaratkab.go.id

Web-mail: www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui Implementasi SAKIP maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing sesuai yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

C. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada OPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;

- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

F. Teknik Evaluasi

- a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) kuisioner;
- 2) wawancara;
- 3) observasi;
- 4) studi dokumentasi;
- 5) kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

- b. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP :

- 1) Telaahan sederhana;
- 2) Analisis dan pengukuran data;
- 3) Metode statistik;
- 4) Perbandingan (*benchmarking*);
- 5) Analisis logika program

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

H. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi Implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat dengan rincian kriteria evaluasi sebagai berikut :

- a. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- 1) Perencanaan Kinerja (30.00 %)
- 2) Pengukuran Kinerja (25.00 %)
- 3) Pelaporan Kinerja (15.00 %)
- 4) Evaluasi Internal (10.00 %)

5) Capaian Kinerja (20.00 %).

b. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi :

- 1) Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
- 2) Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- 3) Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
- 4) Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat untuk masing-masing komponen diperoleh hasil evaluasi seperti dalam tabel berikut ini :

**HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020**

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,43	91,43%	Sangat Memuaskan	-2,57
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	8,53	86,30%	Memuaskan	-1,37
B	PEMENUHAN RENSTRA	2,00	2,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
B	KUALITAS RENSTRA	5,00	4,38	87,50%	Memuaskan	-0,63
C	IMPLEMENTASI RENSTRA	3,00	2,25	75,00%	Sangat Baik	-0,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	18,80	94,00%	Sangat Memuaskan	-1,20
B	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4,00	4,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00

b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10,00	10,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6,00	4,80	80,00%	Sangat Baik	-1,20
B	PENGUKURAN KINERJA	26,00	20,84	83,78%	Memuaskan	-4,06
i	PEMENUHAN PENGUKURAN	5,00	5,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
ii	KUALITAS PENGUKURAN	12,50	11,25	90,00%	Memuaskan	-1,25
iii	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7,50	4,69	62,53%	Baik	-2,81
C	PELAPORAN KINERJA	16,00	12,38	82,62%	Memuaskan	-2,61
i	PEMENUHAN PELAPORAN	3,00	2,81	93,75%	Sangat Memuaskan	-0,19
ii	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7,50	5,98	79,73%	Sangat Baik	-1,52
iii	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4,50	3,60	80,00%	Sangat Baik	-0,90
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	7,77	77,65%	Sangat Baik	-2,24
i	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	2,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
ii	KUALITAS EVALUASI	5,00	3,89	77,80%	Sangat Baik	-1,11
iii	PEMANFAATAN EVALUASI	3,00	1,88	62,50%	Baik	-1,12
E	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20,00	17,26	86,25%	Memuaskan	-2,74
	KINERJA YANG DIPAPORAKAN (OUTPUT)	7,50	6,00	80,00%	Sangat Baik	-1,50
	KINERJA YANG DIPAPORAKAN (OUTCOME)	12,50	11,25	90,00%	Memuaskan	-1,25
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100,00	85,77	85,77%	Memuaskan	-14,23

Secara Umum Hasil Reviu Implementasi SAKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat Terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

I. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai sebesar **85,77 %** dengan kategori **Memuaskan**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat,

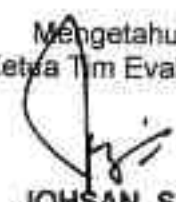
2. Saran / rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Dilakukan langkah perbaikan / revisi yang terkait dengan :
 - 1) Pengukuran kinerja perlu dikembangkan menggunakan teknologi informasi
 - 2) Pencapaian sasaran/kinerja organisasi belum dianalisa secara memadai
 - 3) Jumlah sampel yang digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) relatif sedikit yaitu dari 895 orang pedagang yang wajib tera ulang namun yang diambil menjadi sampel, hanya 16 orang (0,02 %)
 - 4) Belum dilampirkan data pendukung yang memadai mengenai tercapainya target pertumbuhan industri serta peningkatan ekspor perdagangan daerah di Kabupaten Lombok Barat.
- b. Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat harus lebih ditingkatkan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/ rekomendasi agar segera ditindaklanjuti mengacu ketentuan yang berlaku.

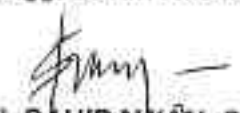
Mengetahui
Ketua Tim Evaluasi


JOHSAN, SE

NIP.19640905 198603 1 021

Gerung, 22- Maret 2021

Anggota Tim Evaluasi


HJ. SAHIDAWAN, S.PI.

NIP. 19681231 199503 2019

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO	KOMPONEN SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)					
1.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	30,00	91,42%	27,43	
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	10,00	86,25%	8,63	
1	Renstra SKPD telah disusun	2,00	100,00%	2,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		Y	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		A	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		Y	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	87,50%	4,38	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)					
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rnci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	80,00%	4,80	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjkan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	83,75%	20,94	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (6%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai ukuran kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	90,00%	11,25	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00	OK
8	Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat dandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikalifikasikan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0,75	OK
19	IKU telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	82,61%	12,39	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	93,75%	2,81	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	79,71%	5,98	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjkan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK

9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	77,67%	7,77	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	100,00%	2,00	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		A	1,00	OK
II. KUALITAS EVALUASI (8%)		6,00	77,83%	4,69	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1,00	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	62,50%	1,88	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	86,25%	17,25	
KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	80,00%	6,00	
1	Target dapat dicapai		A	3,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00	
KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	90,00%	11,25	
4	Target dapat dicapai		A	5,00	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	2,50	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	3,75	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	85,77%	85,77	

Ketua Tim

 JOHSAH SE
 NIP. 19540905 198603 1 021

TIM EVALUASI LAPOR SKPD TAHUN 2021
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

Anggota Tim

 H. S. HADAWAN B.P.
 NIP. 19681231 198903 2 019

**KERTAS KERJA EVALUASI
TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI**

NO	TUJUAN	RENSTRA IP		SASARAN	RENSTRA IP		PK IP	
		ORIENTSI HASIL			ORIENTSI HASIL		ORIENTASI HASIL	
	RENSTRA IP			RENSTRA IP				
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui sektor perindustrian	Y	1	Meningkatnya pertumbuhan industri	Y	1	Y	1
	Meningkatnya perekonomian daerah melalui sektor perdagangan	Y		Meningkatnya ekspor perdagangan daerah	Y	1	Y	1
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik daerah	Y	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Y	1	Y	1
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Y	1	Meningkatnya Nilai AKIP	Y	1	Y	1
				PK IP				
1				Meningkatnya pertumbuhan industri	Y	1	Y	1
2				Meningkatnya ekspor perdagangan daerah	Y	1	Y	1
3				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Y	1	Y	1
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja				
4								
			100,00%			100,00%		100,00%

[illegible]

[illegible]

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU									
			MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN		CUKUP		DIUKUR	
	IKU IP											
1	Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatnya ekspor perdagangan daerah	Nilai ekspor perdagangan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
4	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME IP												
			SASARAN		IK TEPAT		TARGET TERCAPI		KINERJA LEBIH BAIK		DATA ANDAL				
	IP														
	OUTCOME														
1	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase pertumbuhan industri	Y	1	Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
					Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
								100,00%			100,00%			75,00%	
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Y	1	Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
								100,00%			100,00%			75,00%	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y	1	Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
4	meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Y	1	Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
		Persentase pemenuhan kriteria							100,00%			100,00%			75,00%
		Nilai pada Kriteria							1,00			1,00			0,75

**HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	RET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,43	91,43%	Sangat Memuaskan	-2,57
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	9,63	96,30%	Memuaskan	-1,37
a	PEMENUHAN RENSTRA	2,00	2,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
b	KUALITAS RENSTRA	5,00	4,38	87,50%	Memuaskan	-0,63
c	IMPLEMENTASI RENSTRA	3,00	2,25	75,00%	Sangat Baik	-0,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	18,80	94,00%	Sangat Memuaskan	-1,20
a	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4,00	4,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10,00	10,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6,00	4,80	80,00%	Sangat Baik	-1,20
B	PENGUKURAN KINERJA	25,00	20,94	83,76%	Memuaskan	-4,06
I	PEMENUHAN PENGUKURAN	5,00	5,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
II	KUALITAS PENGUKURAN	12,50	11,25	90,00%	Memuaskan	-1,25
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7,50	4,69	62,53%	Baik	-2,81
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,39	82,62%	Memuaskan	-2,61
I	PEMENUHAN PELAPORAN	3,00	2,61	87,50%	Sangat Memuaskan	-0,39
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7,50	5,98	79,73%	Sangat Baik	-1,52
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4,50	3,60	80,00%	Sangat Baik	-0,90
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	7,77	77,65%	Sangat Baik	-2,24
I	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	2,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
II	KUALITAS EVALUASI	5,00	3,89	77,80%	Sangat Baik	-1,11
III	PEMANFAATAN EVALUASI	3,00	1,88	62,50%	Baik	-1,13
E	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ORGANISASI	20,00	17,28	86,28%	Memuaskan	-2,72
	KINERJA YANG DI LAPORAKAN (OUTPUT)	7,50	6,00	80,00%	Sangat Baik	-1,50
	KINERJA YANG DI LAPORAKAN (OUTCOME)	12,50	11,28	90,24%	Memuaskan	-1,22
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100,00	85,77	85,77%	Memuaskan	-14,23



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**INSPEKTOR
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT

Jl. SOEKARNO-HATTA GIRI MENANG GERUNG TELP. (0370) 6186366

Fax : (0370) 6186366, KodePos 83363

Email : inspektoratkabobar@gmail.com

Website : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Gerung, 22 Maret 2021

Nomor : 800/181/Inspektorat/II/2021
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020**

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat
di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat (Laporan terlampir)

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pt. Inspektur,

H. Ilham, S.Pd. M.Pd
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

INSPEKTORAT

Jl. SOEKARNO-HATTA GIRI MENANG GERUNG TELP. (0370) 6186366

Fax : (0370) 6186366, KodePos 83363

Email : inspektoratkablobar@gmail.com

Website : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- f. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- h. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan meningkatkan hasil evaluasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- b. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Teknik Evaluasi

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) kuisioner;
- 2) wawancara;
- 3) observasi;
- 4) studi dokumentasi;
- 5) kombinasi beberapa teknik tersebut di atas

b. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP :

- 1) Telaahan sederhana;
- 2) Analisis dan pengukuran data;
- 3) Metode statistik;
- 4) Perbandingan (*benchmarking*);
- 5) Analisis logika program

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

B. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi Implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat dengan rincian kriteria evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- a. Perencanaan kinerja (30.00 %)
- b. Pengukuran kinerja (25.00 %)
- c. Pelaporan kinerja (15.00 %)
- d. Evaluasi internal; (10.00 %)
- e. Capaian kinerja. (20.00 %)

2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi

- a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
- b. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- c. Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria

masing-masing komponen yang ada dalam LKE;

- d. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIPTahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat diperoleh hasil evaluasi seperti pada tabel berikut ini :

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	28,19	93,98%	Sangat Memuaskan	-1,81
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	9,09	90,94%	Memuaskan	-0,91
A	PEMENUHAN RENSTRA	2,00	2,00	100%	Sangat Memuaskan	0,00
B	KUALITAS RENSTRA	5,00	4,84	96,88%	Sangat Memuaskan	-0,16
C	IMPLEMENTASI RENSTRA	3,00	2,25	75,00%	Sangat Baik	-0,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	19,90	99,50%	Sangat Memuaskan	-0,10
A	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4,00	4,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,0
B	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10,00	10,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,0
C	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6,00	5,10	85,00%	Memuaskan	-0,90
B	PENGUKURAN KINERJA	25,00	21,58	86,25%	Memuaskan	-3,44
I	PEMENUHAN PENGUKURAN	5,00	5,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,0
II	KUALITAS PENGUKURAN	12,50	11,88	95,00%	Sangat Memuaskan	-0,62
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7,50	4,69	62,50%	Baik	-2,81
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,58	83,86%	Memuaskan	-2,42
I	PEMENUHAN PELAPORAN	3,00	3,00	100%	Sangat Memuaskan	0,0
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7,50	5,98	79,71%	Sangat Baik	-1,52
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4,50	3,60	80,00%	Sangat Baik	-0,90
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	7,64	76,42%	Sangat Baik	-2,36
I	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	1,88	93,75%	Sangat Memuaskan	-0,12
II	KUALITAS EVALUASI	5,00	3,89	77,83%	Baik	-1,11
III	PEMANFAATAN EVALUASI	3,00	1,88	62,50%	Baik	-1,12
E	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI	20,00	15,76	78,78%	Memuaskan	-4,24
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	7,50	7,00	93,33%	Sangat Baik	-0,50
	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTCOME)	12,5	8,76	70,06%	Sangat Baik	-3,74
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100	85,73	85,73%	Memuaskan	-14,27

Secara Umum Hasil Reviu Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dengan Dilandasi Nilai Patuh Patih Patja*

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai sebesar 85,73 % dengan kategori **Memuaskan**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat,

2. Saran/rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMD tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah.
- b. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Monitor dan Evaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan target-target yang ingin dicapai, sebagai dasar pemberian reward dan funishment.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/rekomendasi agar segera ditindak lanjuti mengacu ketentuan yang berlaku.

Mengetahui
Ketua Tim



JOHSAN, SE

NIP. 19640905 198603 1 021

Gerung, 12 Maret 2021

Pelaksana Reviu



ULFAHNI, SE

NIP. 19820610 200501 2 005

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	93,80%	28,19	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	90,94%	9,09	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	100,00%	2,00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (6%)		6,00	98,68%	4,84	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1,00	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	75,00%	2,25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	95,50%	19,10	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	100,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK

c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	85,00%	5,10	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	88,25%	21,56	
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,6%)	12,60	95,00%	11,88	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0,75	OK
19	IKU telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	83,86%	12,58	
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	OK
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	78,71%	5,98	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK

8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	76,42%	7,64	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	93,75%	1,88	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (8%)		6,00	77,83%	3,89	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	62,50%	1,88	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	78,79%	15,76	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	93,33%	7,00	
1	Target dapat dicapai		A	3,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A	3,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	70,86%	8,76	
4	Target dapat dicapai			3,74	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,65	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,17	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	86,73%	85,73	

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS
KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'Y/T'
KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'A'
UNTUK PERTANYAAN E.4-16 JAWABAN DITULIS PADA KKE1-I, KKE1-II, DAN KKE1-III

Nilai Perencanaan berdasarkan kriteria = 90/100	AA	Sangat Memuaskan
Nilai Pelaksanaan berdasarkan kriteria = 80/80	A	Memuaskan
Nilai Penunjang berdasarkan kriteria = 75/75	BB	Sangat Baik
Nilai Perencanaan secara keseluruhan = 80/100	B	Baik
Nilai Pelaksanaan berdasarkan kriteria = 70/80	CC	Cukup
Nilai Penunjang berdasarkan kriteria = 60/75	C	Kurang
Nilai Pelaksanaan secara keseluruhan = 65/80	D	Sangat Kurang

Kepua Tim

JOHSAN, SE
NIP. 19640905 198603 1 021

Gerung 22 Maret 2021
Pelaksana Revisi

ULFAHNI, SE
NIP. 19820810 200501 2 019

KERTAS KERJA EVALUASI
CAPAIAN SASARAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME IP									
			SASARAN TEPAT	IP TEPAT	TARGET TERCAPAI		KINERJA LEBIH BAIK		DATA AMAL			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah surat masuk dan keluar			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan limbah dengan baik			Y	I	B	0,75			B	0,75
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara pertumbuhannya dengan baik			Y	I	B	0,75			B	0,75
		Jumlah jasa administrasi keuangan			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah jasa keberanian kantor			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah rapat/pertemuan/koordinasi/konsultasi pelaksanaan kegiatan PMD tahun desain			Y	I	A	1			A	1
		Pemertamaan kebidayaan sarana dan prasarana aparatur	Y	I	Y	I	A	1			A	1
		Jumlah gedung kantor PMD yang terpelihara dengan baik			Y	I	A	1			B	0,75
		Jumlah kendaraan dinas R2 dan R4 yang terawat dengan baik			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah pendinginan kantor yang terpelihara dengan baik			Y	I	A	1			B	0,75
		Pemertamaan kebidayaan aparatur			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah sosialisasi/pemilihan/pengantar yang terlaksana			Y	I	A	1			A	1
2	Meningkatnya nilai AKIP	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Y	I	Y	I	A	1	99,03%		91,67%	95,53%
		Jumlah dokumen laporan bulat/tahunan/wilayah/tahunan			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan, perkembangan, dan tahunan DPMD			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah dokumen KUA PRAS, RPA, CPA dan DPKA			Y	I	A	1			A	1
3	Meningkatnya perkembangan di bidang pemerintahan	Persentase pendapatan asli desa (PAD) terhadap APBDDes			Y	I	A	1	100,00%		100,00%	100,00%
		Jumlah pemberi pengujian kapasitas pengelola lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan yang ikut pengujian kapasitas			Y	I	B	0,75			B	0,75
		Jumlah timbuan TTD			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah gelar TTD Nasional yang diikuti			T	C	E	0			E	0
		Jumlah Desa yang mendapat pembinaan Poka P2WKSS secara intensif			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pelaksanaan gelang rakyat			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah desa yang mendapat pembinaan kewibawaan pemerintah secara intensif	Y	I	Y	I	A	1			A	1
		Jumlah nagas desa siapa naragas yang dimiliki			T	E	E	0			E	0
		Jumlah desa yang mendapat pembinaan kewibawaan PMK secara intensif			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah desa yang telah menyusun swg-wag desa			Y	I	A	1			A	1
		Jumlah BUMDes yang pengurusnya telah mengikuti pelatihan			Y	I	A	1			A	1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME IP									
			SASARAN TERPACU	IK TERPACU	TARGET TERPACU		NOMOR ALTERNATIF		DATA ANGKA			
		Jumlah desa yang mengadopsi ADD dan atau DO untuk RUMDes		Y	I	A	1		A	1		
		Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi		Y	I	A	1		A	1		
		Jumlah desa yang telah mempunyai profil desa		Y	I	B	0,75		B	0,75	B	0,75
		Jumlah desa dengan tingkat 2 tahun terendah yang tercapai		Y	I	A	1		A	1	A	1
							82,32%			82,32%		79,17%
		Jumlah pengurus BKAD yang terlatih		Y	I	A	1		A	1	A	1
		Jumlah desa yang mempunyai Perkap prototipe badan desa		Y	I	A	1		A	1	A	1
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan/dibantu/dibantu/dibantu		Y	I	B	0,75		B	0,75	B	0,75
		Jumlah perangkat desa yang terlatih dalam pengelolaan keuangan desa		Y	I	B	0,75		B	0,75	B	0,75
		Jumlah perangkat desa yang terlatih dalam manajemen pemerintahan desa		Y	I	A	1		A	1	A	1
		Jumlah desa yang melaksanakan jarkitah kapro desa yang demokratis dan aman		Y	I	A	1		A	1	A	1
		Jumlah regulasi yang sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa		Y	I	A	1		A	1	A	1
		Jumlah Desa dengan ADD yang berdaya guna		Y	I	A	1		A	1	A	1
		Jumlah upaya koordinasi yang melibatkan unsur dari semua desa di lingkok bawahi		Y	I	A	1		A	1	A	1
		Jumlah desa dengan RPDes yang tersinkronisasi dengan RP/MD		Y	I	A	1		A	1	A	1
				Y/I	Belum ada	A/B/C/D/E	Belum ada		A/B/C/D/E	Belum ada	A/B/C/D/E	Belum ada
				Y/I	Belum ada	A/B/C/D/E	Belum ada		A/B/C/D/E	Belum ada	A/B/C/D/E	Belum ada
		Persentase pemenuhan kriteria					94,44%			94,44%		94,44%
		Nilai pada Kriteria					0,7			0,736889		0,8

**KERTAS KERJA EVALUASI
TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI**

NO	TUJUAN	RENSTRA IP		SASARAN	RENSTRA IP		PK IP	
		ORIENTSI HASIL			ORIENTASI HASIL		ORIENTASI HASIL	
	RENSTRA IP			RENSTRA IP				
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Y	1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Y	1		
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	Y	1	Meningkatnya Nilai AKIP	Y	1		
3	Meningkat serta semakin meratanya keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Y	1	Meningkatnya perkembangan di Bidang Pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan	Y	1		
				PK IP				
1				Meningkatkan Kualitas pelayanan publik			Y	1
2				Meningkatnya Nilai AKIP			Y	1
3				Meningkatnya perkembangan di Bidang Pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan			Y	1
			100,00%			100,00%		100,00%

**KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA TUJUAN IP**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RENSTRA IP		KRITERIA INDIKATOR KINERJA TERUKUR DALAM DOKUMEN								PENGUKURAN	
					MEASURABLE	ORIENTASI HASIL	RELEVAN	CUKUP						
	RENSTRA IP													
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Presentase pelayanan administrasi perkantoran	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Presentase ketersediaan sarana dan prasarana	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
		Presentase kehadiran aparatur	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	Presentase pelaporan capaian kinerja dari	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
3	Meningkat serta semakin meratanya keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Presentase Pendapatan Asli Desa (PAD)	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Presentase pengomnangan BUMDes	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
		Presentase swadaya masyarakat terhadap	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
		Presentase desa yang menyampaikan laporan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1			Y	1
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
4	Tujuan pada KKE2A TS Belum Disi		Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
5	Tujuan pada KKE2A TS Belum Disi		Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
6	Tujuan pada KKE2A TS Belum Disi		Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
7	Tujuan pada KKE2A TS Belum Disi		Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
	Tujuan pada KKE2A TS Belum Disi		Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi			Y/T	Belum Disi

[illegible]

**KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA SASARAN IP**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KRITERIA INDIKATOR KINERJA TERUKUR DLM DOKUMEN PERENCANAAN								PENGUKURAN	
			RENSTRA IP	PK IP	MEASURABLE	ORIENTASI	RELEVAN	CUKUP	IP			
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Jumlah surat masuk dan keluar	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah jasa komunikasi: sumber daya air dan listrik dengan baik	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah jasa administrasi keuangan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah jasa kebersihan kantor	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah rapat/pertemuan/koordinasi/ konsultasi pelaksanaan kegiatan PMD keluar daerah	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah gedung kantor PMD yang terpelihara dengan baik	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah kendaraan dinas R2 dan R4 yang terawat dengan baik	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara dengan baik	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Persentase kehadiran aparatur	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah sosialisasi perundang-undangan yang terlaksana	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatnya Nilai AKP	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah dokumen laporan bulanan/semester/tahunan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah dokumen KUA, PPAS, RKA, DPA, dan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi	Y/T	Belum Disi
3	Meningkatnya perkembangan di Bidang Pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan	Persentase pendapatan asli desa (PAD)	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah peserta penguatan kapasitas pengelola	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan yang ikut penguatan kapasitas	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah timus TTG	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah gelar TTG Nasional yang diikuti	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah Desa yang mendapat pembinaan Pokja P2WKSS secara intensif	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah desa yang mendapat pembinaan kelembagaan penyandu secara intensif	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KRITERIA INDIKATOR KINERJA TERUKUR DLM DOKUMEN PERENCANAAN								PENGUKURAN			
			RENSTRA IP	PK IP	MEASURABLE		ORIENTASI		RELEVAN		CUKUP	IP		
		Jumlah satgas desa siaga narkoba yang tertatih	Y	1		Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	
		Jumlah desa yang mendapat pembinaan kelembagaan PKK secara insentif	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah desa yang telah menyusun rwg-rwg desa	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah BUMDes yang pengurusnya telah mengikuti pelatihan	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah desa yang mengadopsikan ADD dan atau DD untuk BUMDes	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah desa yang telah menyusun profil desa	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah desa dengan kinerja 2 tahun terakhir yang kompetitif	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah pengurus BKAD yang tertatih	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah desa yang mempunyai Petub penitapan batas desa	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah desa/kelurahan yang dimakarkor/dikembangkan/dibuat statusnya	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah perangkat desa yang tertatih dalam pengelolaan keuangan desa	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah perangkat desa yang tertatih dalam manajemen pemerintahan desa	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa yang demokratis dan aman	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah regulasi yang sejalan dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah Desa dengan ADD yang berdaya guna	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah rapat koordinasi yang melibatkan unsur dari semua desa di Lombok barat	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
		Jumlah desa dengan RPJDes yang tersinkronisasi dengan RPJMD	Y	1		Y	1	Y	1			Y	1	
				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%

**KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA IP**

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU							
			MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN		CUKUP	
	IKU IP									
1	Meningkatnya perkembangan di Bidang Pemerintahan, Kewilayahan serta Kemasyarakatan	% Desa dengan kateogori Desa Cepat Berkembang	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y	1
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y	1
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y	1
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y	1
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y	1
2			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
3			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
4			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
5			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
6			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
7			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

DINAS PARIWISATA

**INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT INSPEKTORAT

Jalan Soekarno-Hatta, Gin Menang Gerung No. Telp (0370) 681030

Fax. (0370) 681030, Kode Pos 83363

Email : inspektorat@lombokbaratkab.go.id

Web-mail : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Gerung, 22 Maret 2021

Nomor : 800 / 109 / Inspektorat / III / 2021
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Lapoan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Barat
di –

Gerung

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020. (Laporan terlampir)

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pt Inspektur,

H. ILHAM, S.Pd, M.Pd
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Peringgal

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/50

TO: THE SECRETARY

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

11. [illegible]

12. [illegible]

13. [illegible]

14. [illegible]

15. [illegible]

16. [illegible]

17. [illegible]

18. [illegible]

19. [illegible]

20. [illegible]

21. [illegible]

22. [illegible]

23. [illegible]

24. [illegible]

25. [illegible]

26. [illegible]

27. [illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT INSPEKTORAT

Jalan Soekarno-Hatta Girih Menang Gerung No. Telp (0370) 681030

Fax (0370) 681030, Kode Pos 83363

Email : inspektoral@lombokbaratkab.go.id

Web-mail : www.inspektoral.lombokbaratkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(SAKIP) DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui Implementasi SAKIP, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan meningkatkan hasil evaluasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan kinerja, termasuk di dalamnya perencanaan strategis, dan perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penilaian terhadap pengukuran kinerja, termasuk di dalamnya pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran;
- c. Penilaian terhadap pelaporan kinerja, termasuk di dalamnya pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja;
- d. Penilaian terhadap evaluasi internal, termasuk di dalamnya pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi; serta
- e. Penilaian terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi, meliputi indikator kinerja out-put dan indikator kinerja out-come.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced unsurve*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Teknik Evaluasi

- a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:
 - 1) Kuisisioner;
 - 2) Wawancara;
 - 3) Observasi;
 - 4) Studi dokumentasi;
 - 5) Kombinasi beberapa teknik tersebut di atas

b. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP :

- 1) Telaahan sederhana;
- 2) Analisis dan pengukuran data;
- 3) Metode statistik;
- 4) Perbandingan (*benchmarking*);
- 5) Analisis logika program

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

B. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi Implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dengan rincian kriteria evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- a. Perencanaan Kinerja (30,00 %);
- b. Pengukuran Kinerja (25,00 %);
- c. Pelaporan Kinerja (15,00 %);
- d. Evaluasi Internal (10,00 %); dan
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20,00 %)

2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi

- a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
- b. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- c. Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;

- d. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, diperoleh hasil evaluasi seperti pada tabel berikut ini :

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	Perencanaan Kinerja	30.00	27.70	92.33	Sangat Memuaskan	-2.30
I	Perencanaan Strategis	10.00	9.50	95.00	Sangat Memuaskan	-0.50
a	Pemenuhan Renstra	2.00	2.00	100	Sangat Memuaskan	0.00
b	Kualitas Renstra	5.00	5.00	100.00	Sangat Memuaskan	0.00
c	Implementasi Renstra	3.00	2.50	83.33	Memuaskan	-0.50
II	Perencanaan Kinerja Tahunan	20.00	18.20	91	Sangat Memuaskan	-1.80
a	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	4.00	4.00	100.00	Sangat Memuaskan	0.00
b	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	10.00	10.00	100.00	Sangat Memuaskan	0.00
c	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	6.00	4.20	70.00	Baik	-1.80
B	Pengukuran Kinerja	25.00	20.00	80	Sangat Baik	-5.00
I	Pemenuhan Pengukuran	5.00	5.00	100	Sangat Memuaskan	0.00
II	Kualitas Pengukuran	12.50	10.31	82.50	Memuaskan	-2.19
III	Implementasi Pengukuran	7.50	4.69	62.50	Baik	-2.81
C	Pelaporan Kinerja	15.00	13.30	88.64	Memuaskan	-1.70
I	Pemenuhan Pelaporan	3.00	3.00	100.00	Sangat Memuaskan	0.00
II	Penyajian Informasi Kinerja	7.50	6.70	89.29	Memuaskan	-0.80
III	Pemanfaatan Informasi Kinerja	4.50	3.60	80.00	Sangat Baik	-0.90
D	Evaluasi Internal	10.00	7.64	76.42	Sangat Baik	-2.36
I	Pemenuhan Evaluasi	2.00	1.88	93.75	Sangat Memuaskan	-0.13
II	Kualitas Evaluasi	5.00	3.89	77.83	Sangat Baik	-1.11
III	Pemanfaatan Evaluasi	3.00	1.88	62.50	Baik	-1.13

**Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Mandiri, Sejahtera dan Berprestasi
Didukung Nilai Patuh Patuh Patju**

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20.00	16.88	84.38	Memuaskan	-3.13
	Kinerja Yang Dilaporkan (Output)	7.50	5.00	66.67	Baik	-2.50
	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)	12.50	11.88	95.00	Sangat Memuaskan	-0.63
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100	85.51	85.51%	Memuaskan	-14.49

Secara Umum Hasil Reviu Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pariwisata Tahun 2020 terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai sebesar **85,51** termasuk dalam kategori **A**, dengan tingkat akuntabilitas **Memuaskan**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

2. Saran/rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- Memperhatikan syarat indikator kinerja (memenuhi kriteria SMART) baik dalam penyusunan indikator dan menetapkan target yang relevan dan memenuhi kriteria target yang baik.
- Agar melakukan monitoring dan reviu secara berkala terhadap pencapaian target dalam Renstra dan pencapaian Rencana Aksi.
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran dan monitoring kinerja berdasarkan IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan ditindaklanjuti dengan *incentive/merit system* (sistem penilaian kinerja pegawai).

- d. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai, sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- e. Menyusun *Cascading Kinerja* berdasarkan Indikator Kinerja Utama dari level struktural (Eselon II, III, IV) sampai dengan individu pegawai (staf).
- f. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat harus lebih di tingkatkan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/rekomendasi agar segera ditindaklanjuti mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Gerung, 22 Maret 2021

Mengetahui
Ketua



JOHSAN SE

NIP. 196409051986031021

Pelaksana Reviu



Ir. AGUNG WAHYU MARTONO

NIP. 196303091990031016

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	DINAS PARIWISATA		KONTROL KERANGKA
			Y	Nilai	
1	2	3	4	5	6
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	92.33%	27.70	
1.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	95.00%	9.50	
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	100.00%	2.00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1.00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	100.00%	5.00	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1.00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1.00	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1.00	OK
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	83.33%	2.50	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1.00	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0.75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0.75	OK
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	91.00%	18.20	
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	100.00%	4.00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	100.00%	10.00	
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1.00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1.00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1.00	OK

NO	KOMPONEN/ISU/ KOMPONEN	BOBOT	DINAS PARIWISATA		KONTROL KERANGKA
1	2	3	4	5	6
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1.00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (5%)		6.00	70.00%	4.20	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1.00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		C	0.50	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		C	0.50	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	80.00%	20.00	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00	100.00%	5.00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1.00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12.50	82.50%	10.31	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0.75	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		B	0.75	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1.00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7.50	82.50%	4.69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0.75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0.75	OK
19	IKU telah direvisi secara berkala		B	0.75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.50	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	DINAS PARWIBATA		KONTROL KERANDOKA
			Y	NILAI	
1	2	3	4	5	6
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	88.54%	13.30	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	100.00%	3.00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian KU		A	1.00	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7.5%)		7.50	89.29%	6.70	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1.00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjalkan		A	1.00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1.00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0.75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A	1.00	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0.75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.5%)		4.50	80.00%	3.60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0.75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0.75	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0.75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0.75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	78.42%	7.84	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	90.75%	1.88	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan-hambatan		Y	1.00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1.00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1.00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0.75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	77.83%	3.89	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1.00	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0.75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0.67	OK

NO	KOMPONEN/ISSB KOMPONEN	BOBOT	DINAS PAHAWESATA		KONTROL KERANGKA
			Y	NILAI	
1	2	3	4	5	6
81	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3.00	62.50%	1.88	
11	Hasil evaluasi program telah diindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0.75	ok
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah diindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0.50	ok
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)					
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	20.00	84.38%	16.88	
		7.50	84.87%	5.00	
1	Target dapat dicapai		B	2.00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12.50	95.00%	11.88	
4	Target dapat dicapai			4.00	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2.00	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5.00	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	88.11%	85.51	

KETUA
JOHANA, SE

NIP. 196409051988031021

TIM EVALUASI LAKIP SKPD TAHUN 2020
KABUPATEN LOMBOK BARAT
ANGGOTA TIM

I. AGUNG WAHYU MARTONO
NIP. 196303091990031016

**KERTAS KERJA EVALUASI
TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI**

NO	TUJUAN	RENSTRA IP		SASARAN	RENSTRA IP		PK IP	
			ORIENTSI HASIL			ORIENTSI HASIL		ORIENTASI HASIL
	RENSTRA IP			RENSTRA IP				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Y	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Y	1		
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Y	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	Y	1		
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Y	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dan Meningkatnya Kualitas Fasilitas Sarana Penunjang di Destinasi Wisata	Y	1		
				PK IP				
1				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Y	1
2				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah.			Y	1
3				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dan Meningkatnya Kualitas Fasilitas Sarana Penunjang di Destinasi Wisata.			Y	1
			100.00%			100.00%		100.00%

KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA IP

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU							
			MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN		CUKUP	
	IKU IP									
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Pariwisata	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRS dan Meningkatkan Kualitas Fasilitas Sarana Penunjang di Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Lama Tinggal (Length of Stay)	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Jumlah Desa Wisata	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
				100.00%		100.00%		100.00%		100.00%



①

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung Telp. (0370) 6186366

Fax : (0370) 6186366, Kode Pos 83363

Email : inspektorat.lobar@gmail.com

Website : inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Nomor : 800/166 / Inspektorat / III / 2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020

Gerung, 22 Maret 2021

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Barat
di -

T e m p a t

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat (Laporan terlampir)

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih


Plt. Inspektur,
H. ILHAM, S.Pd, M.Pd
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Pertinggal

Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dilandasi Nilai Panut Patuh Patju



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung Telp. (0370) 6186366

Fax : (0370) 6186366, Kode Pos 83363

Email : inspektorat.lobar1@gmail.com

Website : inspektorat.lombokbaratkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(SAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- f. PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan meningkatkan hasil evaluasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik *"criteria referenced survey"*, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria

evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Teknik Evaluasi

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) Kuisisioner;
- 2) Wawancara;
- 3) Observasi;
- 4) Studi dokumentasi;
- 5) Kombinasi beberapa teknik tersebut di atas

b. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP :

- 1) Telaahan sederhana;
- 2) Analisis dan pengukuran data;
- 3) Metode statistik;
- 4) Perbandingan (*benchmarking*);
- 5) Analisis logika program

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

B. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dengan rincian kriteria evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- a. Perencanaan Kinerja (30.00 %)
- b. Pengukuran Kinerja (25.00 %)
- c. Pelaporan Kinerja (15.00 %)
- d. Evaluasi Internal; (10.00 %)
- e. Capaian Kinerja. (20.00 %)

2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi

- Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
- Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
- Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat diperoleh hasil evaluasi seperti pada tabel berikut ini :

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,12	90,40%	Sangat Memuaskan	-2,88
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	8,57	85,69%	Memuaskan	-1,43
a	PEMENUHAN RENSTRA	2,00	1,94	97,22%	Sangat Memuaskan	-0,06
b	KUALITAS RENSTRA	5,00	4,38	87,50%	Memuaskan	-0,62
c	IMPLEMENTASI RENSTRA	3,00	2,25	75,00%	Sangat Baik	-0,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	18,55	92,75%	Sangat Memuaskan	-1,45
a	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4,00	3,75	93,75%	Sangat Memuaskan	-0,25
b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10,00	10,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00
c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6,00	4,80	80,00%	Sangat Baik	-1,20
B	PENGUKURAN KINERJA	25,00	20,31	81,25%	Memuaskan	-4,69
I	PEMENUHAN PENGUKURAN	5,00	5,00	100,00%	Sangat Memuaskan	0,00

Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dilandasi Nilai Patuh Patuh Patju

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
II	KUALITAS PENGUKURAN	12.50	10.63	85.00%	Memuaskan	-1.87
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7.50	4.69	62.50%	Baik	-2.81
C	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.39	82.61%	Memuaskan	-2.61
I	PEMENUHAN PELAPORAN	3.00	2.81	93.75%	Sangat Memuaskan	-0.19
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7.50	5.98	79.71%	Sangat Baik	-1.52
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4.50	3.60	80.00%	Sangat Baik	-0.90
D	EVALUASI INTERNAL	10.00	7.64	76.42%	Sangat Baik	-2.36
I	PEMENUHAN EVALUASI	2.00	1.88	93.75%	Sangat Memuaskan	-0.12
II	KUALITAS EVALUASI	5.00	3.89	77.83%	Sangat Baik	-1.11
III	PEMANFAATAN EVALUASI	3.00	1.88	62.50%	Baik	-1.12
E	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20.00	17.79	88.98%	Memuaskan	-2.21
	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTPUT)	7.50	7.50	100.00%	Sangat Memuaskan	0.00
	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTCOME)	12.50	10.29	82.33%	Memuaskan	-2.21
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100.00	85.26	85.26%	Memuaskan	-14.74

Secara Umum Hasil Reviu Evaluasi Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai sebesar **85.26** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dilandasi Nilai Pantu Patuh Patju

2. Saran/rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat agar terus meningkatkan kinerja dan capaiannya dengan:

- 1) Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi perlu ditingkatkan
- 2) Hasil Evaluasi program/akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, perbaikan kinerja dan mengukur keberhasilan masing-masing bidang/bagian.
- 3) Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai, sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- 4) Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat harus lebih di tingkatkan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/rekomendasi agar segera ditindaklanjuti mengacu ketentuan yang berlaku.

Gerung, 22 Maret 2021

Mengetahui :

Ketua Tim,



JOHSAN, SE

NIP. 19640905 198603 1 021

Pelaksana Reviu



DESAK KM. SINUNG SUMERTHI, S.Adm

NIP. 19730818 199203 2 001

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	Nilai	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	90,40%	27,12	
1	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	85,68%	8,57	
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	97,22%	1,94	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0,75	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	87,30%	4,38	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	92,75%	18,55	
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	93,75%	3,75	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		B	0,75	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atau Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK

13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	80,00%	4,80	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	81,25%	20,31	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	88,00%	10,83	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (Indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari seingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		B	0,75	OK
19	IKU telah ditinjau secara berkala		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	82,61%	12,39	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	93,75%	2,81	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK

II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	79,71%	5,98	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjangkan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	78,42%	7,84	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	93,75%	1,88	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	77,83%	3,89	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1,00	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	62,50%	1,88	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	80,96%	17,79	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	100,00%	7,50	
1	Target dapat dicapai		A	3,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A	1,50	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A	3,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	82,33%	10,29	

4	Target dapat dicapai			5,00	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2,29	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,00	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	85,26%	85,26	

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'Y/T'

KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'A'

UNTUK PERTANYAAN E.4-16 JAWABAN DITULIS PADA KKE I-I, KKE I-II, DAN KKE I-III

Nilai Penilaian berdasarkan kriteria = 90-100	AA	Sangat Memuaskan
Nilai Penilaian berdasarkan kriteria = 80-90	A	Memuaskan
Nilai Penilaian berdasarkan kriteria = 70-80	BB	Sangat Baik
Nilai Penilaian berdasarkan kriteria = 60-70	B	Baik
Nilai Penilaian berdasarkan kriteria = 50-60	CC	Cukup
Nilai Penilaian berdasarkan kriteria = 40-50	C	Kurang
Nilai Penilaian berdasarkan kriteria = 0-40	D	Sangat Kurang

Mengetahui :
Ketua Tim,

JOHSAN, SE
NIP.19640905 198803 1 021

Gerung, 22 Maret 2021

Pelaksana Review


DESAK KM. SINUNG SUMERTIH, S.Adm
NIP. 19730818 199203 2 001

**KERTAS KERJA EVALUASI
TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI**

NO	TUJUAN	RENSTRA IP		BASARAN	RENSTRA IP		PK IP	
		ORIENTSI HASIL			ORIENTSI HASIL		ORIENTASI HASIL	
	RENSTRA IP			RENSTRA IP				
1	Meningkatnya Kerukunan dan Keharmonisan Kebangsaan	Y	1	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah	Y	1		
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih	Y	1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada	Y	1		
				PK IP				
1				Meningkatnya Kondusifitas Kinerja Perangkat Daerah			Y	1
2				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Y	1
3				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Y	1
			100,00%			100,00%		100,00%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KRITERIA INDIKATOR KINERJA TERURUT DLM DOKUMEN PERENCANAAN										PENGUKURAN			
			RENSTRA IP		PK IP		MEASURABLE		ORIENTASI		RELEVAN		CUKUP		IP	
		RENSTRA IP														
1	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Persentase Kasus Konflik Bersas yang Tertangan	Y	T		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Y	T		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Y	T		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	
		PK IP														
1	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Persentase Kasus Konflik Bersas yang Tertangan			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y/T	Belum Dini
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y/T	Belum Dini
					100,00%			100,00%			100,00%			100,00%		100,00%

KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA IP

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU									
			MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN	CIKUP		DIUKUR		
	IKU IP											
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai AKIP OPD	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Prosentase Kamus Konflik SARA Yang Terlangar	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP OPD	Y	1	Y/T	Belum Diisi	Y	1	Y	1	Y	1
				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%

[illegible]



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

**DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT
2021**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT
Jl. SOEKARNO-HATTA GIRI MENANG GERUNG TELP. (0370) 6186366
Fax : (0370) 6186366, Kode Pos 83363
Email : inspektoratkablobar@gmail.com
Web-mail : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Nomor : 800 / 186 / Inspektorat / II / 2021
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020**

Gerung, 22 Maret 2021

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Barat
di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Laporan terlampir).

Selanjutnya atas Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut agar menjadi perhatian untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


H. ILHAM, S.Pd. M.Pd.
NIP.19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung sebagai Laporan
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT
Jl. SOEKARNO-HATTA GIRI MENANG GERUNG TELP. (0370) 681030
Fax : (0370) 681030, Kode Pos 83363
Email : inspektorat@lombokbaratkab.go.id
Web-mail : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sehingga dapat diketahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) masing-masing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan meningkatkan hasil evaluasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced surueu*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Teknik Evaluasi

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) kuisisioner;
- 2) wawancara;
- 3) observasi;
- 4) studi dokumentasi;
- 5) kombinasi beberapa teknik tersebut di atas

b. Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP:

- 1) telaahan sederhana;
- 2) analisis dan pengukuran data;
- 3) metode statistik;
- 4) perbandingan (*benchmarking*);
- 5) analisis logika program

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

B. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi Implementasi SAKIP atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dengan rincian kriteria evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :

- a. perencanaan kinerja (30.00 %)
- b. pengukuran kinerja (25.00 %)
- c. pelaporan kinerja (15.00 %)
- d. evaluasi internal; (10.00 %)
- e. capaian kinerja. (20.00 %)

2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi

- a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
- b. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- c. Hasil evaluasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
- d. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .

Berdasarkan Langkah kerja tersebut setelah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat diperoleh hasil evaluasi seperti pada tabel berikut ini :

NO	DAFTAR EVALUASI	BOBOT	CAPAIAN	PROSENTASE	KATEGORI	KET (DEVIASI)
1	2	3	4	5	6	7=4-3
A	PERENCANAAN KINERJA	30	27,73	92,42	SANGAT MEMUASKAN	-2,275
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10	8,63	86,25	MEMUASKAN	-1,36
A	PEMENUHAN RENSTRA	2	2,00	100,00	SANGAT MEMUASKAN	0,00
B	KUALITAS RENSTRA	5	4,38	87,50	MEMUASKAN	-0,63
C	IMPLEMENTASI RENSTRA	3	2,25	75,00	SANGAT BAIK	-0,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20	19,10	95,50	SANGAT MEMUASKAN	-0,90
A	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4	4,00	100,00	SANGAT MEMUASKAN	0,00
B	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10	10,00	100,00	SANGAT MEMUASKAN	0,00
C	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6	5,10	85,00	MEMUASKAN	-0,90
B	PENGUKURAN KINERJA	25	20,31	81,25	MEMUASKAN	-4,69
I	PEMENUHAN PENGUKURAN	5	5,00	100,00	SANGAT MEMUASKAN	0,00
II	KUALITAS PENGUKURAN	12,5	10,94	87,50	MEMUASKAN	-1,56
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7,5	4,38	58,33	CUKUP	-3,13
C	PELAPORAN KINERJA	15	13,83	92,21	SANGAT MEMUASKAN	-1,17
I	PEMENUHAN PELAPORAN	3	3,00	100,00	SANGAT MEMUASKAN	0,00
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7,5	7,23	96,43	SANGAT MEMUASKAN	-0,27
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4,5	3,60	80,00	SANGAT BAIK	-0,90
D	EVALUASI INTERNAL	10	7,43	74,33	SANGAT BAIK	-2,57
I	PEMENUHAN EVALUASI	2	1,88	93,75	SANGAT MEMUASKAN	-0,13
II	KUALITAS EVALUASI	5	3,68	73,67	SANGAT BAIK	-8,68
III	PEMANFAATAN EVALUASI	3	1,88	62,50	BAIK	-1,13
E	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20	15,63	78,13	SANGAT BAIK	-4,38
	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTPUT)	7,5	5,00	66,67	BAIK	-2,50
	KINERJA YANG DILAPORAKAN (OUTCOME)	12,5	10,63	85,00	MEMUASKAN	-1,88
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100	84,93	84,93	MEMUASKAN	-15,07

Secara Umum Hasil Reviu Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Terlampir dalam Kertas Kerja Evaluasi.

Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Mandiri, Sejahtera dan Berprestasi
Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 memperoleh nilai sebesar **84,93 %** dengan kategori **Memuaskan**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

2. Saran/rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Agar melakukan monitoring dan reviu secara berkala terhadap pencapaian target dalam Renstra.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran dan monitoring kinerja berdasarkan IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan ditindaklanjuti dengan *incentive/merit system* (sistem penilaian kinerja pegawai).
- c. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, serta memaksimalkan upaya tindak lanjut hasil evaluasi tersebut dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- d. Agar pemberian *reward* dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang pencapaian kinerjanya baik.
- e. Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat harus lebih ditingkatkan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan dan untuk saran/ rekomendasi agar segera ditindaklanjuti mengacu ketentuan yang berlaku.

Gerung, 22 Maret 2021

Mengetahui,
Ketua Tim


JOHSAN, S.E.

NIP.19640905 198603 1 021

Pelaksana Reviu



ASRO' NUR ASTUTI, S.E.

NIP.19870308 201903 2 004

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)			92,42%	27,73	
	I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	86,25%	8,63	
	a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	100,00%	2,00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
	b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	87,50%	4,38	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75	OK
	c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK
20	Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)			85,50%	19,10	
	a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
	b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	Nilai	
1	2		3	4	5
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	85,00%	5,10	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengendalian dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	81,25%	20,31	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	87,50%	10,94	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (Indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	58,33%	4,38	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		C	0,50	OK
19	IKU telah direvisi secara berkala		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	92,21%	13,83	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2	3	4	5	6
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)					
		7,50	96,43%	7,23	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1,00	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A	1,00	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)					
		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)					
		10,00	74,33%	7,43	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)					
		2,00	93,75%	1,88	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)					
		5,00	73,67%	3,68	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)					
		3,00	62,00%	1,88	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)					
	KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	20,00	78,13%	15,63	
		7,50	88,67%	5,00	
1	Target dapat dicapai		8	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		8	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		8	2,00	
	KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12,50	85,00%	10,63	
4	Target dapat dicapai			4,58	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2,29	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,75	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	84,93%	84,93	

TIM EVALUASI LAKIP SKPD TAHUN 2020
KABUPATEN LOMBOK BARAT


Ketua
Johny, S.E.

NIP.19840905 198603 1 021

Pelaksana Revisi


Asro' Nur Astuti, S.E.

NIP.19870308 201903 2 004

**KERTAS KERJA EVALUASI
CAPAIAN SASARAN/KINERJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME IP										DATA ANGGAL			
			SASARAN TEPAT		IK TEPAT		TARGET TERCAPAI			KINERJA LEBIH BAIK						
	IP															
	OUTCOME															
1	Peningkatan IKM Unas Kalautan dan Perikanan dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM OAP	Y	1	Y	1	A	1	OK		A	1	OK	B	0,75	
										100,00%			100,00%			75,00%
2	Evaluasi Nilai AKIP	Nilai AKIP Minimal 61	Y	1	Y	1	A	1	OK		A	1	OK	B	0,75	
										100,00%			100,00%			75,00%
3	Peningkatan Konsumsi Makanan Ikan	Tercapainya Angka Konsumsi Makanan Ikan	Y	1	Y	1	B	0,75	OK		B	0,8	OK	B	0,75	
										75,00%			75,00%			75,00%
4	Peningkatan Produktifitas Geran Rakyat	Tercapainya Volume Produksi Geran Rakyat	Y	1	Y	1	A	1	OK		A	1	OK	B	0,75	
										100,00%			100,00%			75,00%
5	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Y	1	Y	1	A	1	OK		A	1	OK	B	0,75	
										100,00%			100,00%			75,00%
6	Peningkatan Produktifitas Perikanan Budidaya	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Y	1	Y	1	B	0,75	OK		B	0,8	OK	B	0,75	
										75,00%			75,00%			75,00%
7	Tersedianya Produk Olahan Hasil Kelautan Perikanan	Tercapainya Volume Produksi Pengolahan	Y	1	Y	1	A	1	OK		A	1	OK	B	0,75	
										81,67%			81,67%			75,00%
		Nilai pada Kriteria							→	0,92		→	0,82			75,00%

[illegible]

KERTAS KERJA (MALLAH)
INDIKATOR KINERJA SASARAN 19[illegible]

**KERTAS KERJA EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA IP**

NO	TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU									
			MEASURABLE		ORIENTASI HASIL		RELEVAN		CUKUP		DIUKUR	
	IKU IP											
1	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP Dinas Minimal B	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat IKM Dinas	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	Y	1	Y	1	Y	1	Y		Y	1
		Volume Produksi Garam Rakyat	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Volume Produksi Perikanan Tangkap	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Volume Produksi Perikanan Budidaya	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
		Volume pengolahan produk perikanan	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%